

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih menghadapi permasalahan besar dalam perkembangan kota-kotanya. Pada tahun 1980 penduduk perkotaan berjumlah sekitar 32,85 juta (22,27% dari jumlah penduduk nasional). Tahun 1990 jumlah penduduk perkotaan menjadi sekitar 55,43 juta (30,9% dari jumlah penduduk nasional). Tahun 1995 jumlah penduduk perkotaan menjadi sekitar 71.88 juta (36,91% dari jumlah penduduk nasional). Saat ini jumlah penduduk perkotaan seluruhnya diperkirakan mencapai hampir 110 juta orang, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 3 juta orang. Sensus penduduk tahun 2000 mencatat total jumlah penduduk adalah 206.264.595 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk perkotaan pada kurun waktu 1990-2000 tercatat setinggi 4,4%/tahun, sementara pertumbuhan penduduk keseluruhan hanya 1,6%/tahun. Tingkat urbanisasi mencapai 40% (tahun 2000)¹, dan diperkirakan akan menjadi 60% pada tahun 2025 (sekitar 160 juta orang)². Perkembangan kota-kota yang pesat ini disebabkan oleh perpindahan penduduk dari desa ke kota, perpindahan dari kota lain yang lebih kecil, pemekaran wilayah atau perubahan status desa menjadi kelurahan. Fenomena urbanisasi yang terjadi di kota-kota besar mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan ruang kota, seperti fasilitas perumahan, sebagai salah satu

¹ <http://www.bps.go.id/sector/population/table1.html>

² Bank World, 2003

kebutuhan dasar manusia. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota pelajar dan kota budaya juga merupakan kota besar yang tentunya tidak luput dari arus urbanisasi.

Fenomena urbanisasi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan ruang kota, seperti fasilitas perumahan, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Hal ini membuka peluang bagi *developer property* untuk mengembangkan sayap industri bisnis propertinya. Berdasarkan UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang mengisyaratkan agar setiap kota menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang bagi setiap kegiatan pembangunan.

Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) sebagai departemen yang menangani masalah penataan ruang sangat *concern* dengan masalah ini, karena jika intensifikasi pembangunan tanpa disertai penataan ruang maka pengembangan menjadi tidak berpola dan inefisiensi pelayanan sarana dan prasarana. Departemen Kimpraswil membutuhkan langkah terbaru dan inovatif untuk melaksanakan program Sinkronisasi Penataan Ruang dengan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman³, yaitu pola pengelolaan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Sebagai langkah untuk program sinkronisasi, Departemen Kimpraswil membutuhkan laporan yang komprehensif untuk mengetahui perkembangan pembangunan perumahan dan pemukiman.

Hal inilah yang mendasari penulis untuk mengangkat topik *Pembangunan Web Intelligence Geographics* untuk

³ makalah Aplikasi Penataan Perumahan dan Pemukiman Masyarakat dalam Penataan Ruang Kota sesuai Kebijakan Pemerintah, DirJen Penataan Ruang, Departemen Kimpraswil, 2004

Membantu Keputusan Penataan Pemukiman Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tiap *developer property* mempublikasikan data perumahan mereka dan Departemen Kimpraswil memiliki wewenang untuk mengambil data tersebut. Data perumahan ini akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Selain data perumahan dari *developer property*, Departemen Kimpraswil memiliki data pemukiman yaitu data penduduk, data lahan dan data rumah. Data pemukiman kemudian diolah menjadi sebuah informasi. Informasi inilah yang akan ditampilkan dalam bentuk laporan yang komprehensif. Pengambilan sumber data perumahan tiap *developer* dilakukan melalui *web service*. Laporan akan ditampilkan dalam bentuk grafik dan peta yang mewakili wilayah DIY. Software yang digunakan adalah ASP.NET. Software yang digunakan untuk pembuatan peta adalah ArcView.

Diharapkan Pembangunan *Web Intelligence Geographics* selain dapat mengetahui data perumahan yang dikembangkan oleh *developer property* dengan lebih cepat dan efisien, hasil laporan dari aplikasi WIG juga dapat digunakan untuk membantu Departemen Kimpraswil dalam mengambil keputusan-keputusan yang strategis sebagai langkah penataan pemukiman di wilayah DIY.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang muncul dari latar belakang masalah antara lain :

1. Bagaimana membangun *Web Intelligence Geographics* yang dapat memberikan informasi perumahan yang dibangun oleh *developer* dengan akurat dan efisien

untuk kebutuhan penataan pemukiman wilayah DIY berbasis GIS (*Geographical Information System*)?

2. Bagaimana menyajikan suatu laporan yang komprehensif untuk membantu analisis pemukiman wilayah DIY di masa yang akan datang?

1.3. Batasan Masalah

Penyusunan skripsi ini dibatasi oleh beberapa hal yaitu :

1. Sumber data yang digunakan adalah data *developer* yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Diasumsikan tiap *developer* yang ada di wilayah DIY selain *on-line* ke internet juga menyediakan *web service*.
3. Setiap *developer* diasumsikan memiliki skema database yang sama.
4. Data perumahan pada peta tidak dapat dihapus.

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun penelitian dalam mengembangkan perangkat lunak ini dilakukan dengan tujuan :

1. Membangun suatu aplikasi *Web Intelligence Geographics* untuk membantu pengambilan keputusan penataan pemukiman wilayah DIY.
2. Menyajikan hasil analisa pemukiman wilayah DIY dalam bentuk laporan yang komprehensif.

1.5. Metodologi

1.5.1. Observasi

Melakukan pengamatan dan mempelajari secara langsung aplikasi terkait di internet maupun aplikasi yang telah dibuat dan didokumentasikan oleh universitas.

1.5.2. Studi Pustaka

Dengan mengumpulkan data dari buku-buku referensi dan media cetak maupun sumber-sumber lain.

1.5.3. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Menganalisis data-data yang dibutuhkan untuk merancang serta mendesain perangkat lunak.

1.5.4. Desain

Mendesain atau merancang perangkat lunak sebagai acuan implementasi perangkat lunak tersebut.

1.5.5. Implementasi dan Pengujian

Mengimplementasikan dan menguji perangkat lunak yang telah dibuat.